

BAB V

ANALISA HASIL PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, maka pada bab ini akan dianalisis Representasi Politik *Maramba* Dalam Menentukan Calon Kepala Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai) sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa pada proses pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2015 yang berlangsung di Kabupaten Sumba Timur, membawa representasi/keterwakilan *Maramba* dalam pergulatan politik seperti yang terjadi di Desa Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur sebagai sebuah desa wilayah kekuasaan *Maramba* Kabupaten Sumba Timur.

Representasi/keterwakilan *Maramba* tersebut kemudian mendapat perhatian berbagai partai politik besar guna menjadikan sebagai mesin pendongkrak suara pada setiap pemilihan umum yang digelar di setiap daerah. Pada saat pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sumba Timur tahun 2015 dilaksanakan, otoritas pilihan politik masyarakat di Desa Palakahembi di pengaruhi oleh kuatnya representasi/keterwakilan *Maramba* dalam mengarahkan masyarakat untuk menentukan atau menjatuhkan pilihan mereka pada salah satu pasangan yang disarankan oleh *Maramba*.

Masyarakat di Desa Palakahembi dalam menjatuhkan pilihan pada pemilihan umum Kepala Daerah masih mengikuti arahan dari *Maramba* di desa tersebut. Seorang *Maramba* dianggap mampu menggerakkan masyarakat dalam proses pemilihan umum Kepala Daerah. Ketokohan seseorang dalam masyarakat merupakan

Representasi/Kerwakilan kepentingan masyarakat itu sendiri, maka dari itu sesuai yang dikemukakan sebelumnya bahwa *Maramba* ialah orang yang dianggap memiliki pengaruh dalam mempengaruhi masyarakat.

Representasi/keterwakilan dari *Maramba* dalam mengarahkan masyarakat untuk menjatuhkan pilihan itu dilakukan karena mereka memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Fakta objektif beranggapan bahwa representasi/keterwakilan *Maramba* bersentuhan langsung dengan sistem politik yang terdesentralisir di daerah. Sehingga dari hasil penelitian di Desa Palakahembi, mengindikasikan bahwa *Maramba* memiliki keterwakilan yang sangat penting dalam proses pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sumba Timur di Desa Palakahembi.

Dalam penelitian ini variabel yang dianalisis yaitu, representasi politik *maramba* baik dalam bentuk representasi deskriptif dan representasi simbolik, yaitu :

5.1 Aspek Representasi Deskriptif

Representasi Deskriptif, merupakan bentuk perwakilan *maramba* berdasarkan kesamaan (deskriptif) dimana *representative* dan the *represented* memiliki deskriptif yang sama. Dalam hal ini, bentuk representasi politik *maramba* yang berdasarkan kesamaan geopolitik yang ditandai dengan kesamaan identitas, kebudayaan, wilayah kesatuan dan budaya *pahamang* dalam adat Sumba Timur dalam menentukan calon Kepala Daerah.

Aspek Representasi Deskriptif dianalisis menggunakan indicator sebagai berikut:

5.1.1 Kesamaan identitas (bahasa, agama, kepentingan, kebutuhan, dan pekerjaan)

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa adanya setiap identitas individu mempunyai dimensi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu identitas personal, identitas sosial, dan identitas menyeluruh. Identitas personal adalah keunikan individu, kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut seseorang, bentuk tubuh yang berbeda-beda, data biografi yang berbeda dan identifikasinya bersifat subjektif. Identitas sosial adalah identitas yang melekat secara sosial, merupakan anggota dari etnis tertentu, bahasa, agama, budaya, kepentingan, pekerjaan, kebangsaan atau kelompok lainnya, dan berelasi satu sama lain, dengan cara formal maupun informal. Anggota kelompok-kelompok tersebut saling mendefinisikan dan membedakan diri

mereka sendiri dengan kelompok lain. Identitas menyeluruh adalah mendefinisikan dirinya dan menentukan mereka akan hidup dan bertindak laku sebagai manusia.

Bahasa daerah Sumba Timur mengenal adanya kata dasar, akar kata bahkan juga gaya pengungkapannya, dan dalam hubungan itulah sebuah kata, ungkapan untuk dipahami, demikian juga kata *Marapu*. Kata *Marapu* berasal dari akar kata : *Pu* = jantung (bahasa Sumba *Kambera*). *Pu* berasal dari kata *Pu'u* = pokok, pangkal (pokok/pangkal pohon, inti) misalnya dalam ungkapan berpasangan, dikenal ungkapan : *pu'u a'i // mata we'e* (pangkal pohon // sumber air). Contoh lain dimanapun digunakan sebagai pokok/pangkal : *Ka pu'utana* = tanah yang pokok, yang pangkal, yang awal, yang pertama, maksudnya orang yang pertama menempati suatu tempat/wilayah pemukiman/perkampungan asli Sumba, biasanya disebut sebagai *Ka pu'u tana* dan dipanggil sebagai *mangu tana* (yang empuhnya tanah, tuan/pemilik tanah).

Pu'u juga masih ditemukan dalam ungkapan berpasangan untuk menunjukkan kerjasama gotong royong dalam arti luas misalnya : *ghorana pu'u // kadona lawi* (bersama mengangkat pangkal yang berat // bersatu mengerjakan yang berat maupun yang ringan. *Pu'u* sebagai suku/akar kata kunci dalam *Marapu*, maka dapat dijelaskan arti *Marapu* berdasarkan arti katanya sebagai berikut : *Pu (pu'u)* = pokok, pangkal, sumber, dasar; *Ma* = yang. Jadi *Marapu*(sang pokok, sang pangkal, sang sumber, sang asal, sang dasar).¹

¹ Dialek Sumba Timur : Bahasa *Kambera*

Masyarakat Sumba, selain ditentukan oleh persekutuan berdasarkan tempat kediaman *paraingu Marapu*² dan juga berdasarkan keturunan *kabihu*,³ mengenal pula pembagian golongan dalam kehidupan kemasyarakatannya.

Secara tradisi masyarakat Sumba terbagi atas empat golongan, yaitu (*rato*) imam, pengatur keagamaan, (*maramba*) bangsawan, pengatur masyarakat, (*kabihu*) orang merdeka dan (*ata*) hamba. Pada perkembangan selanjutnya, golongan pertama dan kedua seringkali disatukan dalam sebutan *ratu-maramba* sebagai golongan yang memimpin dalam segala bidang aktifitas masyarakat, seperti dalam bidang religius, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

Golongan *ratu-maramba* sebagai golongan tertinggi dalam masyarakat Sumba sangat dihormati dan disegani, bahkan sampai sekarang walaupun mereka tidak lagi mempunyai kedudukan politis formal. Golongan bangsawan inilah yang mempunyai wewenang memimpin dan bertanggung jawab atas keharmonisan hidup komunal dalam segala bidang, merekalah yang dianggap sebagai kunci masuk ke dalam masyarakat Sumba.

Orang dari golongan bangsawan inilah, terutama yang termasuk golongan bangsawan tinggi (*maramba bokulu*), yang dapat menjadi seorang Raja, bukan karena tingkat pendidikan atau kekayaannya, tapi ditentukan oleh asal muasal keturunannya. Seorang *Maramba* sebagai pimpinan tertinggi dalam suatu *Paraingu Marapu* bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya. Dia pula lah yang

²*Paraingu* : Kampung, Kuatak

³Kabihu (Klen) : Rekan Kerja Para *Maramba* Dalam Kehidupan Bermasyarakat

mempunyai kekuasaan atas para *ama bokulu* (bapak besar) atau para ketua suatu *kabihu* untuk mewakili warganya dalam segala urusan masyarakatnya.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hamba Pullu salah seorang masyarakat Desa Palakahembi :

“Golongan ini (*maramba bokulu*) adalah bangsawan yang karena turunannya, kemampuannya dan penghargaannya tetap memelihara hubungan perkawinannya dengan bangsawan-bangsawan *kabihu* lain yang sama derajat dan turunannya dalam hal itu. Golongan inilah yang mempunyai banyak orang-orang bawahan, entah golongan *ata* atau *kabihu* yang bersandar kepadanya. Dari golongan inilah terpilih sebagai ”hangaji” raja, ataupun disebut “*maramba*”⁴

Hal ini diperjelaskan oleh Bapak Domu Wullang yang mengatakan bahwa:

“Kami masyarakat sangat menghargai *Maramba* di dalam kampung ini, karena kami menganggap mereka sebagai orang-orang yang memiliki posisi tertinggi dan bertanggung jawab atas kesejahteraan warga. Apa yang dikatakan oleh mereka, kami lebih dengar dan mentaati apa yang dikatakan mereka dari pada yang dikatakan oleh orang lain, karena mereka yang memiliki kedekatan emosional dengan kami”⁵.

Pernyataan dari masyarakat di atas diakui dan dipertegas oleh salah satu seorang

Maramba Bapak Umbu Luta Lapu dengan mengatakannya sebagai berikut:

“Ya memang benar, kedudukan kami sebagai *maramba* dan orang yang di percaya di kampung ini sangat dihargai dan disegani oleh masyarakat. Apa yang kami katakan pasti masyarakat dengar, apa yang kami laksanakan pasti masyarakat ikuti. Lihat saja pada pemilihan kepala daerah waktu itu sampai pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa ini, masyarakat selalu bertukar pikiran dengan kami, selain itu dalam musrenbangdes kami sebagai *Maramba* atau orang yang dipercaya di desa ini memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan program kerja di desa”⁶

⁴ Wawancara Masyarakat Desa Palakahembi, 11 April 2019

⁵ Wawancara masyarakat Desa Palakahembi, 29 Maret 2019

⁶ Wawancara *Maramba*, 29 Maret 2019

Berdasarkan Hasil wawancara di atas tergambar bahwa golongan bangsawan mempunyai julukan-julukan tertentu yang mengungkapkan kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban mereka di dalam *Paraingu Marapu*. Mereka merupakan keturunan dari pendiri, pemilik dan penguasa *paraingu* sebagai *mangu tanangu* (tuan tanah). Biasanya mereka mempunyai gelar kebangsawanan di depan namanya. Untuk seorang laki-laki bergelar *Umbu* atau *Tamu Umbu*, untuk perempuan bergelar *Rambu* atau *Tamu Rambu*. Kadang-kadang mereka dipanggil juga berdasarkan nama *Ata* (hamba) yang mereka percaya atau sayangi.

Golongan yang juga dihormati dalam masyarakat Sumba adalah golongan *kabihu* (orang merdeka). Golongan ini dapat dikatakan sebagai rekan kerja *paramaramba* dalam hidup bermasyarakat. Bahwa mereka adalah orang-orang besar yang turut memperhatikan keadaan *paraingu Marapu* bersama-sama para *maramba*, dan mereka mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan tradisi yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Pada jaman dulu mereka banyak membantu atau bertindak sebagai sekutu dalam peperangan melawan musuh-musuh dari golongan *maramba*. Pada masa kini mereka lebih berperan sebagai penasehat dalam berbagai bidang kehidupan, atau mengusung peran perantara dan pembicara, baik dalam *Pahamang* (musyawarah/perundingan) upacara-upacara keagamaan maupun sampai pada rana publik.

Golongan *ata* (hamba) merupakan lapisan terendah dalam stratifikasi masyarakat Sumba. Golongan ini dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu *ata ndai* (hamba lama) dan *ata bidi* (hamba baru). *Ata ndai* adalah hamba-hamba yang sejak

jaman nenek moyang mereka sudah menjadi *atayang* mengabdikan diri kepada tuannya. Golongan ini tidak mempunyai klen (*kabihu*) tersendiri atau *Marapu* yang mereka puja sendiri. Mereka mengikuti klen dan memuja *Marapu* tuannya. Di dalam suatu rumah *maramba*, hamba-hamba ini dianggap sebagai anggota rumah tangga dan biasanya disebut sebagai *ana keda la kuru uma* (anak-anak dalam rumah) atau *tau la kuru uma* (orang dalam rumah). Kedudukan hamba yang juga disebut *ata bokulu* (hamba besar) ini sangat istimewa. Mereka menjadi juru bicara, bendahara, pengawal kepercayaan dan diberi sejumlah hewan ternak untuk dipelihara. Oleh karena itu, mereka dihormati pula oleh masyarakat seperti menghormati tuannya.

Masyarakat Desa Palakahembi sebagaimana lazimnya masyarakat lain, tentunya juga memiliki tokoh-tokoh panutan yang dijadikan representasi untuk mewakili masyarakat. Masyarakat Desa Palakahembi, dengan keunikan budaya serta terikat secara primordial. *Maramba* dan masyarakat serta orang-orang yang tergolong masyarakat asli yang berpengaruh dan disegani oleh masyarakat dan terkadang menjadi panutan masyarakat di dalam wilayah itu sendiri. *Maramba* tersebut di atas memiliki representasi/keterwakilan yang besar dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Palakahembi. *Maramba* mendapatkan pengakuan dari masyarakat sebagai kelompok yang memiliki posisi tertinggi dan bijak sehingga memiliki pengaruh yang besar untuk merangkul dan menentukan pilihan politik masyarakat.

Dalam rencana pembangunan desa merupakan suatu bentuk kegiatan yang sudah diatur oleh pemerintah desa dan selalu melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam masyarakat seperti halnya *Maramba*. Masyarakat menganggap

maramba sebagai orang yang dipercaya dan bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya dan mewakili kepentingan dari masyarakat. Hasil wawancara dengan Bapak Max Alfonsus Koli selaku Kepala Desa Palakahembi ketika peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut “Bagaimana pandangan bapak tentang *Maramba* dalam kaitannya dengan pembangunan di tingkat desa?”. Terhadap pertanyaan tersebut, beliau mengatakan bahwa :

“Iya, dalam kegiatan pembangunan di desa, mereka *Maramba* selalu memberi dukungan dan selalu terlibat langsung mulai dari proses perencanaan sampai proses pelaksanaan selalu dilibatkan, mereka punya andil yang besar, karena kita pemerintah ini hanya menerima daulat dari mereka selaku *Maramba* yang ada di wilayah. Jadi untuk melaksanakan segala bentuk kegiatan pembangunan di desa, tanpa mereka kita tidak bisa berbuat apa-apa”⁷

Dari hasil wawancara di atas dipertegas lagi oleh Bapak Umbu Retang Rada Jawa beliau merupakan *Maramba* yang berada di Desa Palakahembi, oleh karena itu peneliti mendapatkan informasi bahwa:

“Iya, memang benar, pemerintah selalu melakukan konsultasi dengan kami karena kami mengizinkan dulu baru pemerintah bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Pemerintah tidak terlepas dari kami, makanya setiap ada rapat yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membahas pembangunan di desa, kami selalu di undang untuk mengikuti rapat tersebut, karena pada saat rapat itu kami memberikan masukan-masukan agar dalam kegiatan nanti tidak mendapatkan masalah dan dalam hal dukungan, kami selalu dukung setiap kegiatan yang niatnya untuk desa ini sendiri”⁸

Berdasarkan hasil wawancara mendalam tersebut di atas, bahwa proses pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Palakahembi, tidak terlepas dari kontribusi langsung dari *Maramba*. Pemerintah selalu melibatkan *maramba*,

⁷ Wawancara Kepala Desa, 30 Maret 2019

⁸ Wawancara *Maramba*, 31 Maret 2019

karena *maramba* memiliki representasi yang sangat penting karena tanpa persetujuan dari mereka maka segala proses kegiatan pembangunan desa tidak bisa dilakukan. Hal tersebut karena pemerintah masih menganggap mereka sebagai orang yang memiliki pengaruh di wilayah tersebut dan *maramba* sebagai representasi dari masyarakat Desa Palakahembi.

Munculnya beberapa elit lokal merupakan suatu keniscayaan di dalam masyarakat yang multikultural layaknya yang ada di Kabupaten Sumba Timur, *Maramba* tersebut yang senantiasa berkontribusi buah pemikiran serta ide-ide cemerlang demi pembangunan dan kesejahteraan bagi Kabupaten Sumba Timur. *Maramba* merupakan tokoh yang berperan penting dalam setiap kegiatan yang ada di Desa Palakahembi sebagai tempat tinggal para *Maramba* juga masyarakat Kabupaten Sumba Timur pada umumnya. *Marambayang* dipahami sebagai seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis atau kedudukan yang sangat dihormati masyarakat, memiliki pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat tempat tinggalnya.

5.1.2 Kesamaan Wilayah Hukum Adat

Lembaga adat adalah mitra kerja pemerintahan menyangkut pembinaan Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Desa), serta berfungsi memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah. Hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan yang masih berlaku dan hidup dalam masyarakat masih dipelihara dan dilestarikan. Adat-istiadat dan lembaga adat diakui keberadaannya dan dipergunakan dalam kehidupan oleh masyarakat luas

yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu dibudayakan. Nilai-nilai dan ciri-ciri/budaya dan kepribadian bangsa dimaksud merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perilaku memilih Tokoh adat (*maramba*) masih sangat dipengaruhi system kerabatan/kekeluargaan dalam hal ini marga (*Kabihu*) dan kesamaan wilayah adat. Masih terkesan terikat dengan ikatan-ikatan primordialisme kedaerahan. Pada prinsipnya pemimpin dekat dengan masyarakat, dan memiliki kecerdasan serta aklhak yang baik untuk dijadikan panutan bagi masyarakat. Pada satu sisi ada Tokoh Agama tersebut cenderung memberikan legitimasi kepada salah satu kandidat, walaupun tidak secara langsung mendukung tetapi ini menunjukkan dan menganggap bahwa apa yang dibahasakannya, tersirat dukungan yang terselubung. *Maramba* (Tokoh adat) cenderung mengarahkan pandangan politik masyarakat pada wacana kesukuan dan wilayah kesatuan adat. *Maramba* (Tokoh adat) sebagai *patron* yang memiliki kekuasaan dan mengarahkan opini publik.

Kesamaan wilayah hukum adat juga memiliki hubungan dengan perilaku memilih. Adanya rasa kedaerahan mempengaruhi dukungan seseorang terhadap partai politik atau kontestan tertentu. Hasil temuan diperkuat dengan hasil wawancara berikut ini : menurut Bapak Uumbu Rihi selaku tokoh pemudah mengatakan bahwa :

“Dari pengamatan saya, kandidat calon kepala daerah yang di pilih oleh sebagian besar masyarakat bukan hanya pada pilihan partai, akan tetapi lebih pada dukungan dari *maramba*, isu-isu tokoh adat dan putra daerah. Karena sebagian besar masyarakat selalu membanding-bandingkan dengan kemajuan wilayah lain asal pejabat sebelumnya”⁹

kemudian diperkuat oleh Bapak Umbu Kabaru Windy selaku tokoh agama mengatakan bahwa :

“Alasan saya memilih pasangan GBY-ULP karena berbagai suku bangsa, Dimana calon tersebut merupakan putra asli Sumba Timur, jadi hal yang tidak mungkin saya orang sumba memilih kandidat yang bukan orang asli sumba”¹⁰
Berdasarkan hasil observasi kedua wawancara dapat dianalisis bahwa Adat-

istiadat dan Lembaga adat di akui kemerdekaannya dalam kehidupan masyarakat sejak berabad-abad lampau. *representasi maramba* sangat diperlukan membentuk pemerintahan untuk menyelesaikan berbagai masalah di desa. Melalui Lembaga adat, para tokoh informasi itu menyelesaikan berbagai perkara di desa dengan cara lebih mengutamakan perdamaian, sedangkan tokoh formal (pemerintahan) lebih mengarah pada penyelesaian secara formal, sehingga akhirnya akan menimbulkan dua kubu yang saling bertentangan. Namun demikian peranan tokoh formal masih tetap mendapat tempat ditengah masyarakat selama apa yang dilakukannya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, misalnya dalam dunia pendidikan, bidang pemerintahan dan bidang-bidang lain. *representasi maramba* sangat ditentukan oleh kedudukan seseorang. Karena secara realitas, tatanan budaya adat dalam bidang pemerintahan desa berbasis pada kultur setempat yang secara tanpa disadari mengarah pada perubahan sejalan dengan perkembangan teknologi. Hal ini

⁹ Wawancara Tokoh Pemuda, 02 April 2019

¹⁰ Wawancara Tokoh Agama, 02 April 2019

mengakibatkan sering terjadi gejolak dalam masyarakat yang merasa tidak puas dengan peran tokoh masyarakat formal (pemerintah). Masyarakat lebih mengedepankan tokoh informal (tokoh adat) *maramba* dalam desa. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, keterwakilan tokoh masyarakat lebih mendapatkan tempat di hati rakyat karena memiliki kekuatan arus bawah secara partisipatif.

5.1.3 Kesamaan Budaya

Budaya *Pahamang*¹¹ sering dilakukan di (*uma praingu/uma bakul*)¹² dalam pelaksanaan adat baik dalam adat perkawinan maupun dalam adat kematian. Secara khusus pada tulisan ini penulis mengkaji Budaya *Pahamang* pada pemilihan kepala daerah. *Pahamang* menjadi bagian yang penting dalam adat orang Sumba Timur karena salah satu cara masyarakat Sumba menjaga kekerabatan dalam keluarga, melalui Budaya *Pahamang*, keluarga besar yang berada pada tikar adat memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat mereka dan agar mereka dapat sepemahaman dalam membuat keputusan-keputusan.

Pahamang sendiri memiliki arti berunding, berdiskusi atau musyawarah bersama untuk mencapai suatu keputusan bersama. *Pahamang* menjadi bagian yang penting dalam adat Sumba Timur karena masyarakat Sumba Timur menjunjung

¹¹ Budaya Adat Sumba Timur : *Pahamang* (perundingan dan Musyawara)

¹² Rumah Kampug/Rumah Besar

tinggi kebiasaan untuk bermusyawarah bersama dalam menanggapi dan membahas masalah-masalah yang dihadapi dengan tujuan untuk mendapat kesimpulan yang disetujui bersama dan menjadi keputusan bersama. Masyarakat Sumba pada umumnya sangat menghormati keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan *Pahamang* yang dilakukan bersama.

Pada proses pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2015 yang berlangsung di Kabupaten Sumba Timur membawa keterwakilan dalam budaya *Pahamang* (*maramba*, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemudah) dalam pergulatan politik. Adapun hasil temuan penelitian terkait representasi *maramba* dalam budaya *pahamang* dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Sumba Timur tahun 2015 sebagai berikut: ***Pertama, keterwakilan maramba dalam sosialisasi***, sosialisasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bentuk hajatan demokrasi ditingkat lokal. Sehingga begitu penting pemahaman masyarakat terhadap sistem politik serta bagaimana masyarakat terlibat dan memainkan peran didalamnya sehingga menepatkan politik, yang harus dipromosikan dan di dorong agar masyarakat menjadi subjek politik, tidak hanya jadi penggembira yang dimanfaatkan suaranya ketika pemilihan dan kemudian ditinggalkan dalam kesepian dengan janji kosong dari para politisi.

Sosialisasi-sosialisasi politik yang dilakukan *marambadapat* diartikan sebagai suatu proses untuk mengarahkan masyarakat dalam menjatuhkan pilihan pada proses pemilihan agar memperoleh sikap dan orientasi masyarakat sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya sesuai dengan keinginan elit tradisional/lokal (*maramba*).

Representasi *maramba* di kabupaten Sumba Timur lebih pada upaya sosialisasi kepada masyarakat lewat budaya *pahamang* untuk menentukan pilihan yang mampu mewakili aspirasi dari kesatuan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. representasi *maramba* dalam menentukan pilihan sangat berpengaruh besar karena karena tokoh masyarakat lebih bersentuhan langsung dengan sistem politik yang terdesentralisir di daerah.

Hal ini diungkap oleh Bapak Ngaji Walu Wandja selaku tokoh masyarakat juga selaku pengurus partai Golkar di tingkat Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur :

“untuk memenangkan pemilu pada waktu itu kami sebagai tokoh masyarakat, toko adat selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendekatan dengan cara memaparkan Visi-Misi atau program-program yang menjadi kebutuhan masyarakat, karena mereka menganggap kami sebagai orang yang dipercaya, sehingga apa yang kami katakan mereka juga mengikuti serta mentaati”¹³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Umbu Retang Rada Jawa beliau juga sebagai (*maramba*) tokoh adat di Desa Palakahembi :

“sosialisasi yang biasa dilakukan di desa kami selalu dilibatkan dan bahkan kami yang berbicara paling banyak dibandingkan dengan calon

¹³ Wawancara Tokoh Masyarakat, 03 April 2019

kandidat, itu karena kami ini yang memiliki hubungan dekat dengan masyarakat. Dan masyarakat lebih mendengarkan kami dari pada mereka. Pada saat itu kami langsung mengajak masyarakat dalam *pahamang* untuk memilih calon kandidat sesuai *pahamang* bersama”¹⁴

Untuk memperkuat hasil wawancara mengenai adanya budaya *Pahamang* yang bersifat fungsional antara masyarakat dan tokoh adat, maka berikut ini disajikan hasil dokumentasi mengenai hubungan kerjasama yang harmonis dalam suasana yang kondusif tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3
Wawancara bersama masyarakat dan tokoh adat¹⁵



¹⁴ Wawancara *Maramba*, 04 April 2019

¹⁵ Foto Wawancara bersama Masyarakat dan Tokoh Adat

Dari pernyataan diatas *maramba* dan tokoh masyarakat mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. Selain itu karena *Maramba* tersebut di atas, bahwa sosialisasi-sosialisasi politk yang dilakukan oleh elit lokal dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengarahkan masyarakat dalam menjatuhkan pilihan pada proses pemilihan agar memperoleh sikap dan orientasi masyarakat sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya sesuai dengan keinginan bersama. *Maramba* solid dalam mengambil simpati masyarakat setempat, yang terbangun dalam budaya *pahamang*.

Kedua, keterwakilan maramba dalam partisipasi. Keterwakilan *maramba* dalam partisipasi politik pemilih umum kepala daerah, merupakan wujud dari artikulasi dari pemahaman kognitif. Terlibatnya *maramba* dalam proses sosialisasi seperti yang diuraikan dalam bagian terdahulu, merupakan salah satu bentuk dari partisipasi dan keterlibatan secara fisik memiliki nilai lebih tinggi dari sekedar pengetahuannya. Keaktifan *maramba* dalam mengartikulasikan kepentingan melalui berbagai kegiatan dan aksi sosial merupakan manifestasi dari tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Semuah uraian tahapan partisipasi tersebut juga dimainkan oleh elit lokal (*maramba*). Tantangan mendesak adalah menjadikan pemilihan umum kepala daerah sebagai bentuk artikulasi politik rakyat yang rasional dan kritis. Inilah proses demokratisasi terkadang dimanfaatkan oleh berbagai politik kepentingan, dan terkadang menjadi agen dari kepentingan tertentu dan akhirnya akan menjauhkan dari tatanan demokrasi lokal yang akan dibangun.

Partisipasi dari pemilih untuk terlibat langsung dari kegiatan politik yang salah satunya adalah pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sumba Timur tahun 2015 tidak terlepas dari representasi/keterwakilan *maramba* mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan aktivitas politik. Pendekatan yang digunakan oleh elit tradisional/lokal (*maramba*) terhadap masyarakat yaitu melakukan pendekatan sosial dengan alasan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Maramba sangat berperan penting sebagai suatu bentuk kekuatan untuk mendongkrak suara dalam pemilihan umum kepala daerah. Persoalan ini menjadi hal penting, mana kala dalam meneliti dan mengamati partisipasi memilih masyarakat dalam menjatuhkan pilihan pada pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Sumba Timur tahun 2015. Hal ini merupakan salah satu bukti bagaimana representasi/keterwakilan *maramba* dalam mengarahkan masyarakat pemilih untuk menjatuhkan pilihannya pada paket atau kandidat tertentu dalam pemilihan umum kepala daerah.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Umbu Luta Lapu selaku tokoh adat Kabupaten Sumba Timur :

“partisipasi dari masyarakat dalam memilih calon kandidat dalam pemilihan baik itu pemilihan Kepala Desa, Legislatif, Bupati, atau Gubernur itu tidak terlepas dari campur tangan tokoh-tokoh yang ada di Sumba Timur seperti *maramba*, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Masyarakat di Sumba Timur khususnya di desa palakahembi kalau memilih calon sering mengikuti apa yang di arahkan tokoh-tokoh adat dari pada tim sukses partai politik. Itu sudah menjadi budaya yang melekat dengan masyarakat”¹⁶

¹⁶ Wawancara Tokoh Adat, 04 April 2019

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rambu Amelia Kanda selaku aparat desa :

“saya selalu mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti halnya pemilihan Bupati, pada saat itu juga saya menyarankan mereka untuk memilih paket GBY-ULP, karena saya mendukung paket tersebut. Akhirnya pada pemilihan umum kepala daerah paket GBY-ULP mendapat suara terbanyak”¹⁷

Hasil wawancara juga dipertegas oleh Bapak Daud Diki Taka Jaji (tokoh masyarakat) yang mengatakan bahwa :

“saya sering mendekati masyarakat lalu mengajak mereka untuk memilih paket GBY-ULP. Sebelum pemilihan saya kembali bertemu langsung dengan masyarakat untuk memberitahukan mereka agar memilih paket GBY-ULP. Karena masyarakat mendengar kami selaku tokoh masyarakat, jadi itu yang saya gunakan untuk memenangkan paket GBY-ULP”¹⁸

Ketiga hasil wawancara di atas tergambar bahwa representasi/keterwakilan elit lokal *maramba* mempunyai andil yang besar dalam mengarahkan masyarakat untuk menjatuhkan pilihan. Dengan demikian representasi/keterwakilan *maramba* adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi, memerintah orang lain untuk bertindak sesuai apa yang diinginkan elit lokal dalam lingkup masyarakat. Sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur khususnya di Desa Palakahembi menentukan pilihannya sesuai arahan dari elit lokal (*maramba*).

Berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian ditemukan bahwa partisipasi dari pemilih untuk terlibat langsung dalam kegiatan politik yang salah satunya adalah

¹⁷ Wawancara Aparat Desa, 05 April 2019

¹⁸ Wawancara Tokoh Masyarakat, Jumad 05 April 2019

pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sumba Timur tahun 2015 tidak terlepas dari representasi *Marambam* mengajak masyarakat pemilih untuk ikut serta dalam kegiatan dan aktivitas politik. Pendekatan yang digunakan oleh elit politik lokal terhadap masyarakat yaitu melakukan pendekatan sosial dengan alasan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Bentuk partisipasi masyarakat di Kabupaten Sumba Timur dalam suksesi pemilu pada Kabupaten Sumba Timur terdapat berbagai bentuk partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sumba Timur lebih banyak bersifat pasif, hanya sebagian kecil masyarakat yang aktif dalam proses suksesi pemilu pada setempat.

Hasil wawancara dan hasil observasi di atas diperkuat dengan data perolehan suara pada pemilu pada kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 di tingkat desa dan menurut kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6
Perolehan Suara Pada Pemilu pada Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 di Desa¹⁹
Palakahembi

No.	Desa Palakahembi	GBY-ULP		MK-AL	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Dusun Palakahembi	706	86,84	107	13,16
2.	Dusun Kabar	1.076	91,90	98	8,1
3.	Dusun Menggitimbi	316	61,59	197	38,41
4.	Dusun Laipori	298	73,03	110	26,97
Sumba Timur		2.396	82,39	512	17,61

Sumber : Data Desa Palakahembi

¹⁹Sumber : Data Desa Palakahembi

Tabel 7
Perolehan Suara Pada Pemilu 2015 di Kabupaten Sumba Timur²⁰
Tahun 2015 Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	GBY-ULP		MK-AL	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Lewa	4.755	57,23	3.553	42,77
2.	Nggaha Ori Angu	4.404	87,45	632	12,55
3.	Lewa Tidahu	2.533	76,94	750	23,06
4.	Katala Hamu Lingu	1.626	84,69	294	15,31
5.	Tabundung	3.165	69,13	1.413	30,67
6.	Pinu Pahar	1.666	45,26	2.015	57,74
7.	Paberiwai	1.139	47,66	1.250	52,32
8.	Karera	2.346	64,06	1.316	35,94
9.	Matawai La Pawu	1.132	40,66	1.652	59,34
10.	Kahaungu Eti	2.435	57,77	1.780	42,23
11.	Mahu	1.336	66,57	671	33,46
12.	Ngadu Ngala	1.121	47,14	1.257	52,80
13.	Pahunga Lodu	2.997	43,21	3.926	56,76
14.	Wula Waijelu	2.638	65,93	1.363	34,04
15.	Rindi	3.907	79,54	1.005	20,46
16.	Umalulu	3.452	41,02	4.964	58,98
17.	Pandawai	5.973	77,79	1.705	22,21
18.	Kambata M.	947	52,67	851	47,33
19.	Kota Waingapu	7.926	48,81	8.314	51,19
20.	Kambera	6.199	36,54	10.768	53,46
21.	Haharu	1.666	57,21	1.246	42,79
22.	Kanatang	2.999	64,66	1.630	35,34
Sumba Timur		65.160	54,88	53.557	45,12

Sumber : Data KPUD Sumba Timur

Data di atas hasil perolehan suara pada pemilu 2015 di Kabupaten Sumba Timur tahun 2015 di desa palakahembi dan menurut Kecamatan, terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur periode 2015-2020 yakni Gidion Mbiliyora dan Umu Lili Pekuwalu dengan total perolehan 65.160 suara atau 54,88%. Kemenangan tersebut dipengaruhi oleh dukungan *Maramba* terhadap Paket GBY-ULP. Prinsip

²⁰ Sumber: KPUD Sumba Timur

yang paling menonjol dalam keterlibatan *Maramba* dalam mendorong partisipasi pemilih yang sikap politik *Maramba* yang lebih diarahkan untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memiliki kesamaan geopolitik (suku, adat dan etnis). Mayoritas masyarakat pemilih Desa Palakahembi memilih pasangan calon Gidion Mbiliyora dan Umbu Lili Pekuwali (GBY-ULP). Alasan masyarakat memilih pasangan tersebut jelas karena dipengaruhi dari dukungan *Maramba*.

Ketiga, Representasi/keterwakilan Maramba menjadi bagian dari partai politik. Elit lokal yang menjadi bagian dari partai politik yaitu di mana elit lokal seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama juga menjadi pengurus partai Golkar di tingkat Kabupaten khususnya di Kabupaten Sumba Timur bahkan sampai di tingkat kecamatan. Elit lokal yang juga sebagai pengurus partai Golkar sangat di kenal oleh masyarakat karena mereka menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat, misalnya : berinteraksi saat syukuran adat, upacara kematian (*pamatu maling*), dan upacara perkawinan (*penanti belis; Willi Tau*) sampai pada kegiatan-kegiatan politik.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Gadji Walu Waja selaku tokoh adat, dan beliau juga sebagai pengurus partai di tingkat kecamatan :

“sebagai tokoh adat dan tokoh masyarakat kami juga sebagai pengurus partai Golkar, cara untuk memenangkan partai Golkar, apalagi kami sebagai tokoh masyarakat sangat dikenal dan dipercaya oleh masyarakat karena kami selalu di libatkan dalam upacara kematian maupun dalam urusan adat karena kami selalu menyediakan waktu untuk masyarakat dengan berinteraksi”²¹

²¹ Wawancara Tokoh Adat selaku pengurus partai di tingkat kecamatan, 08 April 2019

Hal ini di perkuat yang di sampaikan oleh salah satu masyarakat, Hinna Bily

Yora :

“pengurus partai Golkar di Kecamatan kami juga adalah tokoh masyarakat dan tokoh adat kami, kami lebih mendengarkan mereka dari pada orang lain, karena pengurus partai seperti merekalah yang bisa menjadi teladan bagi kami dan mereka selalu punya waktu ketika ada urusan adat”²²

Pernyataan di atas peneliti menunjukkan bahwa elit tradisional/lokal yang juga merupakan pengurus partai Golkar di Kabupaten Sumba Timur. Dimana partai Golkar memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat untuk memenangkan partai Golkar dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2015, karena tokoh-tokoh ini sangat di percaya oleh masyarakat dan menjadi teladan bagi masyarakat, kesempatan inilah partai Golkar memilih tokoh elit lokal (*maramba*) menjadi bagian dari partai Golkar. Selain itu karena partai Golkar merupakan partai yang struktur organisasinya lengkap ditingkatkan kecamatan bahkan ke tingkat desa dan partai solid dalam mengambil simpati masyarakat setempat, yang terbangun dalam budaya *Pahamang*.

5.2 Aspek Representasi Simbolik

Representasi Simbolik, representasi *maramba* berdasarkan relasi simbolik yang ada di socio-kultural masyarakat. Model simbolik ini adanya simbol tertentu yang menjadi sistem kepercayaan dan hadir dalam kehidupan masyarakat yang menjadi keseharian. Dalam hal ini bentuk representasi politik *maramba* memperlihatkan adanya rumah adat (*uma praingu/uma bakul*), kepercayaan *Marapu*

²² Wawancara Masyarakat, 08 April 2019

dan kepemilikan tanah ulayat sebagai sumber legitimasi untuk menanamkan kepatuhan dan tujuan bersama mewujudkan melalui *Maramba*. Aspek representasi simbolik dianalisis menggunakan indikator berikut ini :

5.2.1 Rumah adat (*uma praingu/uma bakul*) sebagai simbol kearifan lokal masyarakat dan tempat perundingan dan musyawarah (*pahamang*)

Orang *Marapu*(*Atabara*) sebagai komunitas asli sumba tergolong komunitas atau masyarakat berbasis rumah, dimana segala aktivitas selalu berpusat pada rumah. Rumah adalah ukuran pokok dan sangat penting bagi kualifikasi “bermakna” bagi seluruh aktifitas dan bahkan kehidupan setiap orang Sumba. Segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan manusia setiap hari dalam masyarakat, selalu merujuk pada ruang lingkup rumah. Karena itu ada beberapa istilah teknis berikut; *Marapu Uma* (dewa/wi rumah), *Ngara Uma* (tuan rumah), *Tana Uma* (tanah rumah), *Pamba Uma* (sawah rumah), *Ranga Uma* (ternak/hewan rumah), *rekka uma* (ekonomi uma).

Rumah bagi orang *Marapu*, termasuk masyarakat asli sumba umumnya baik masih menganut *Marapu* maupun yang sudah berpindah agama Kristen (Protestan dan Katolik) atau islam, selalu menjadi sesuatu yang terpokok dalam hidup manusia. Rumah sesungguhnya menjadi unit sosial inti dimana segala jaringan aktivitas kepercayaan, ekonomi, sosial kemasyarakatan maupun urusan publik kenegaraan kebangsaan dirancang dan dipersiapkan sampai dilaksanakan secara teknis operasional, dimulai dan diakhiri di rumah. Rumah adat merupakan wadah resmi pertama dan terakhir dari seluruh siklus kehidupan manusia dimulai dan diakhiri: ritual pemujaan/penyembahan, urusan perkawinan, kelahiran, persiapan kegiatan

pertanian/pertanakan, urusan penguburan kerabat/ warga yang meninggal maupun pelaksanaan berbagai ritual dan upacara adat *Marapu*. Masyarakat Sumba *Marapu* tidak pernah lepas dari pandangan mereka mengenai kedudukan sebuah rumah.

Hasil temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara *Rato* (Imam *Marapu*) : Dati

Diawa mengatakan bahwa:

Ungkapan-ungkapan berikut melukis dinamika kehidupan keseharian orang Sumba pada ruang lingkup rumah dalam pandangan kekerabatan :

- *Kadu uma duangu // watu uma piarang* (agar menara rumah tidak miring // agar tanduk rumah tidak membungkuk)
- *Kana kutungu na kawu // kana duru na epi* (agar asap tetap membubung // agar api tetap menyala)
- *Kana duru na epi la tuluru // kana lulungu nawai* (agar api tungku tetap hidup // agar air di tempayan tetap ada)
- *Ambu dapa tuakang da tuapang // ambu da bata da huru* (agar piring tidak pecah // agar sendok tidak patah).²³

Secara umum klasifikasi rumah bagi orang Sumba terbagi atas dua fungsi yaitu rumah kampung (*uma praingu/uma bakul*) dan rumah kebun (*uma woka*). *Uma praingu* memiliki nilai sakral karena merupakan rumah yang dibangun di dalam kampung dan berfungsi sebagai tempat ritual (*Hamayang*) dan penyimpanan benda-benda suci *marapu*. *Uma Praingu* berfungsi sosial yaitu sebagai tempat hidup keluarga serta interaksi dengan sesama, berfungsi ekonomi yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan, dan berfungsi politik yaitu sebagai tempat terjadinya perundingan (*pahamang*), pengambilan keputusan maupun pusat praktek kepemimpinan keluarga, *kabihu*, dan kampung.

²³Wawancara *Rato* (Imam *Marapu*), 09 April 2019

Uma Paraingu/Uma Bakul mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat Sumba. Di *paraingu* lah mereka berdiam, semua kegiatan sosial ekonomi, politik, keagamaan dan kebudayaan berpusat di dalam *paraingu*. *Paraingu* merupakan salah satu bentuk ikatan persekutuan masyarakat Sumba, merupakan pula suatu rukun kampung di mana para warganya bersama-sama melakukan segala pekerjaan dan usaha secara gotong-royong. Segala upacara keagamaan harus diadakan dalam *paraingu*. Oleh karena itu, *paraingu* bukanlah hanya suatu tempat tinggal saja, tapi juga tempat berpacara keagamaan. *Paraingu* telah disucikan sebagai tempat kediaman para leluhur, karena itu *paraingu* bersifat sakral. bahwa dalam suatu *paraingu* berdiam beberapa klen (*kabihu*) yang berhimpun di dalamnya. *Kabihu* merupakan suatu kelompok orang-orang seketurunan yang didasarkan pada garis keturunan ayah. Warga *kabihu* itu adalah turunan dari satu *marapu* (leluhur) yang menjadicikal bakal dari *kabihu* itu sendiri. Penentuan dan pembagian *kabihu* sudah ditetapkan sejak dahulu kala bersama-sama dengan kedudukan, wewenang, tugas dan kewajiban masing-masing dalam masyarakat. Hasil temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara berikut ini :

Menurut tokoh adat : Bapak Umbu Ngaba Kabuarang mengatakan bahwa:

“suatu *kabihu* dalam suatu *paraingu* mempunyai satu rumah asal, disebut *uma bokulu* (rumah besar), yang menjadi pusat seluruh warga *kabihu* yang diakui sebagai tempat asalnya. Setiap ada peristiwa penting, misalnya melakukan upacara keagamaan, perkawinan, kematian sampai pada kegiatan politik dan sebagainya, di rumah asal inilah semua warga *kabihu* berkumpul”²⁴

²⁴ Wawancara Tokoh Adat (*Rato*), 10 April 2019

Kabihu yang besar, yaitu memiliki warga yang banyak, membuat lagi rumah-rumah lain dan dinamai sesuai dengan tradisi *kabihu* bersangkutan, misalnya *uma ndiawa* (rumah dewa), yaitu rumah untuk melakukan upacara keagamaan; *uma andungu* (rumah tugu), yaitu rumah di mana di depannya ada suatu tugu yang pada masa lalu untuk menancapkan kepala-kepala musuh yang dikalahkan. Bentuk rumah-rumah semacam itu selalu persegi empat dan mempunyai empat tiang utama yang disebut *kambaniru lundungu*. Baik rumah pusat maupun rumah-rumah lainnya, terpenting harus mempunyai atap berbentuk meruncing dan agak patah di tengah seperti menara (serupa menara joglo Jawa). Di dalam menara itulah digunakan untuk menyimpan barang-barang yang dikeramatkan yang disebut *tanggu marapu*.

Rumah pada umumnya merupakan rumah panggung, di bagian muka dan belakang terdapat beranda, bagian kiri dan kanan terdapat ruang untuk tidur dan upacara. Sedangkan di tengah adalah dapur dan di atas merupakan loteng tempat menyimpan barang pusaka. Karena itu pula rumah tradisional Sumba biasanya mempunyai tiga bagian, yaitu bagian bawah atau kolong (melambangkan alam bawah, tempat hunian para arwah), bagian tengah (melambangkan alam tengah, tempat tinggal manusia), dan bagian atas atau menara (melambangkan alam atas, tempat tinggal para dewa).

Untuk memperkuat hasil wawancara dan hasil observasi di atas diperkuat dengan data sekunder mengenai istilah pemahaman akan peran utama sebuah kampung adat *Marapu* dapat dilihat pada tabel 7 dan data hasil dokumentasi *Uma Praingu*. Pada tabel dan gambar berikut

Tabel 8
Istilah kampung adat *Marapu*²⁵

No	Bahasa Sumba	Bahasa Indonesia
01	<i>Iya lara wee // iya lara Ghazu</i>	Satu jalan // satu jalan kayu
02	<i>Lara ndakazan // bina Ndakaloga</i>	Jalan tak bercabang // pintu tak terbongkar
03	<i>Padi patto zira weri</i>	Kampung sebagai tempat pendidikan
04	<i>Pandeuna pakodetana, pandeuna maghailo, wanno</i>	Kampung menjadi tempat kedudukan pemimpin
05	<i>Pandeu kapumama, pandeu Waziwero</i>	Kampung jadi tempat pelayanan warga
06	<i>Ole kilora kangali, ole gholeta kawango</i>	Kampung, tempat pembinaan solidaritas warga

Sumber Data : Istilah kampung adat *Marapu*

Butir pertama dan kedua (01 dan 02) menunjuk pada fungsi dan peran kampung adat; sedangkan butir 03 s/d 06 merupakan penjelasan detail mengenai peranan kampung adat sebagai lokasi yang senantiasa memelihara dimensi persatuan semua warga tanpa terkecuali.

²⁵Sumber data : Istilah kampung Adat Sumba Tulisan Tanggu Bera. Yang Termuat Dalam Karya Pastor Robert Ramone CSsR (2015: 5).

Gambar 4
*Uma praingu/Uma bakul*²⁶



Sumber Gambar: lokasi didusun 2, Dusun Kabar Desa Palakahembi

Bagi orang Sumba rumah bukan sekedar tempat tinggal manusia dengan berbagai aktifitas sehari-hari di dalamnya saja, tetapi juga merupakan tempat melakukan upacara keagamaan, sebagai tempat pertemuan antara manusia dengan para dewa dan arwah lainnya tujuan utama pembangunan rumah pada masyarakat Sumba ialah untuk melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan alam. Untuk hal itu bukan saja diusahakan melalui kegiatan-kegiatan yang didukung oleh benda-benda material saja, tetapi didukung pula oleh kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib. Dalam hal ini rumah sekaligus menjadi tempat melakukan berbagai upacara keagamaan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan rumah tidak bisa dilaksanakan begitu saja, tapi harus dilakukan berdasarkan aturan-

²⁶ Hasil Gambar Rumah Adat

aturan yang berlaku dalam budaya mereka. Pelanggaran terhadap aturan berarti mendatangkan bencana tidak saja pada si pembuat tapi bisa meliputi seluruh warga masyarakat bersangkutan.

Setiap *kabihu* memiliki *Uma praingu* untuk melaksanakan fungsi-fungsinya diatas. Dalam fungsi yang seperti ini, *uma praingu* seringkali disebut *uma bakul* atau rumah besar/bersama karena menjadi pusat dari kekerabatan dan aktivitas sosial-religius. Penghargaan sosial, kenyamanan bathin, serta penjelasan identitas akan diperoleh dalam bobot yang tinggi ketika pelaksanaan berbagai kegiatan adat istiadat maupun religius untuk kawin mawin, kematian, serta ritual-ritual inti pertanian, dilaksanakan di *uma praingu/uma bakul*. Sedangkan *uma woka* merupakan rumah yang dibangun di dataran lebih rendah dari kampung dan berfungsi untuk kegiatan pertanian maupun peternakan.

umapraingu/uma bakul menjadi simbol dari sistem kepercayaan, adat, ekonomi, dan politik. Di dalam kampunglah sistim-sistim tersebut dijaga dan direproduksi melalui interaksi mereka satu sama lainnya ketika berhadapan dengan adat dan realitas sehari-hari yang menawarkan hal-hal yang baru. Hal-hal dari alam mendapat penyesuaian dalam adat dan kepercayaan sehingga membentuk pandangan mereka dalam membentuk *uma bakul*. Posisi rumah, kuburan, bentuk rumah, dan aktivitas sehari-hari mengikuti arti dan makna yang mereka temukan di alam dan menjadi proyeksi dari makna religius yang dianut.

Konstruksi rumah orang Sumba secara umum dan khususnya di Desa Palakahembi, menggambarkan fenomena mikrokosmis dalam hal mana manusia,

makhluk lainnya (ternak atau hewan) serta *Marapu* memiliki tempatnya masing-masing. Dunia manusia menempati posisi tengah tepatnya di balai-balai sebagai tempat *pahamang*. Dibawah balai-balai merupakan dunia binatang. Sedangkan diatas balai-balai atau loteng menjadi tempat makanan. Bubungan rumah yang berada di atas loteng, merupakan tempat *Marapu* yang kehadirannya ditandai oleh *tanggu marapu* (benda-benda suci).

Masyarakat memahami kampung sebagai gambaran dari *Praingu Marapu* (Kampung Marapu). *Praingu Marapu* merupakan tujuan akhir perjalanan jiwa (*ndewa*) manusia setelah meninggal. Dalam pemahaman orang Sumba, di *Praingu Marapu*, jiwa (*ndewa*) orang yang telah meninggal melakukan aktivitas yang sama dengan manusia yang masih hidup. Itulah sebabnya kampung menjadi proyeksi dari kehidupan di *Praingu Marapu* yang dengannya manusia yang hidup berupaya meniru kehidupan pola hidup *marapu* sekaligus melalui kampung, manusia yang hidup masih terus dapat berhubungan dengan para arwah leluhurnya di *Praingu Marapu*. Hasil temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara berikut ini :

Menurut Bapak Kariti Talu Dima selaku masyarakat mengatakan bahwa :

”Hal ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dalam keluargakabihu karena *pahamang* atau diskusi ini dilakukan di *paraingu* untuk mencapai keputusan bersama dan setiap keputusan yang diambil dalam proses ini akan menentukan jalannya adat *Pahamang* sendiri sebagai warisan dari kepercayaan *Marapu*”²⁷

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh *Maramba Ngaba Kamangi* yang mengatakan bahwa :

²⁷ Wawancara Masyarakat, 12 April 2019

“Ketika mengambil keputusan maupun ketika mengakhiri musyawarah (*pahamang*) adat dalam keluarga *Marapu*, apa yang menjadi keputusan bersama harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan dan pamali jika dilanggar. Biasanya keluarga tidak akan melanggar apa yang telah diputuskan dalam adat karena hal itu sudah bersifat mutlak dan harus dilaksanakan”²⁸

Untuk memperkuat hasil wawancara dan hasil observasi maka disajikan data dokumentasi Budaya *Pahamang* dalam upacara adat pada gambar berikut ini :

Gambar 5

Budaya *Pahamang* dalam upacara perkawinan (*Penanti Belis; Willi Tau*) Kain (*Higi*) sebagai salah satu simbol untuk memulainya *Pahamang*²⁹

²⁸ Wawancara *Maramba*, 12 April 2019

²⁹ Hasil Gambar Upacara Perkawinan, 13 April 2019



Gambar 6
Musyawarah dan perundingan (*Pahamang*) pihak keluarga perempuan dan laki-laki³⁰

³⁰ Foto bersama Tokoh Adat dan Jubir, 13 April 2019



Kedua hasil wawancara di atas tergambar bahwa Masyarakat Sumba terkenal dengan sistem kekerabatan yang sangat kuat, sehingga dalam seluruh kehidupan dan pekerjaannya sampai pada kegiatan politik, masyarakat Sumba selalu menekankan pada nilai dan juga ikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Salah satu contoh kebudayaan yang menekankan pada nilai kekerabatan dan kekeluargaan yang masih dipertahankan oleh masyarakat Sumba hingga kini yaitu *Pahamang*.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di temukan bahwa *Pahamang* sendiri memiliki arti berunding, berdiskusi atau musyawarah bersama untuk mencapai suatu keputusan bersama. *Pahamang* menjadi bagian yang penting dalam adat Sumba Timur karena masyarakat Sumba Timur menjunjung tinggi kebiasaan untuk bermusyawarah bersama dalam menanggapi dan membahas masalah-masalah yang dihadapi dengan tujuan untuk mendapat kesimpulan yang disetujui bersama dan menjadi keputusan bersama. Masyarakat Sumba pada umumnya sangat menghormati keputusan-

keputusan yang diambil berdasarkan perundingan atau diskusi yang dilakukan bersama.

Kebiasaan untuk melakukan musyawarah adat sendiri bukanlah hal baru bagi orang Sumba, sejak dahulu masyarakat Sumba telah terbiasa untuk melakukan musyawarah adat para leluhur membangun *Paraingu* dan melakukan musyawarah untuk menetapkan tata kehidupan mereka dan menentukan berbagai adat istiadat serta peraturan yang akan diberlakukan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dari rumusan-rumusan hasil musyawarah masyarakat Sumba kemudian masyarakat mengembangkannya menjadi berbagai macam aturan-aturan yang kemudian menjadi tradisi yang mengatur kehidupan orang sumba, sehingga menjadi tradisi yang mengatur tatanan kehidupan orang Sumba, dan menjadikan kebudayaan yang terus dilestarikan oleh masyarakat Sumba. *Pahamang* sendiri sebagai warisan dari kepercayaan *marapu* tidak hanya dijalankan oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan *Marapu*, melainkan oleh masyarakat Sumba telah menganut agama resmi yang terus mempertahankan kebiasaan untuk melakukan *pahamang*. *Pahamang* sendiri biasanya dilakukan di rumah adat (*uma praignu/uma bakul*) dari *Kabihu*.

Kebudayaan sebagai bagian dari suatu masyarakat turut membentuk peran masyarakatnya dan membentuk identitas dari masyarakat yang menganut kebudayaan tersebut. Oleh karena itu masing-masing orang yang terlibat dalam kebudayaan kemudian menjaga nilai-nilai budaya yang ada dan melestarikan dengan tetap melaksanakan ajaran-ajaran budaya itu dan juga dengan menurunkan nilai-nilai budaya pada generasi-generasi selanjutnya. Seperti kebudayaan yang dianut oleh

masyarakat Sumba. Masyarakat Sumba menjaga nilai-nilai budaya dengan terus melakukan tradisi-tradisi yang diwariskan oleh leluhur dan juga dengan mengajarkan anak-anak mereka tentang budaya itu sendiri, sehingga kebudayaan itu tetap ada.

Kebiasaan untuk melakukan *Pahamang* sebagai bagian dari kebudayaan yang dianut oleh masyarakat Sumba yang terus dijaga hingga kini memperlihatkan perbedaan peran. Dimana memiliki peran yang lebih besar dalam rana publik, Nilai-nilai kebudayaan dan tradisi yang dipegang oleh masyarakat Sumba kemudian menjadi tolak ukur masyarakat dalam membagi peran. Konstruksi masyarakat yang ada kemudian turut mengubah peran manusia dalam hal pekerjaan dan nilai dirinya. Pekerjaan dilihat dari kedudukan dan status dimana elit lokal/tradisional (*maramba*) Sumba sudah diidentikkan berada pada rana publik. Adanya pandangan ini kemudian membangun persepsi tokoh adat dan *maramba* dalam berperan pada sebuah masyarakat. Konstruksi masyarakat demikian justru membuat merasa dirinya tidak mengalami apa yang disebut dengan ketertindasan karena mereka telah larut dalam pengajaran budaya yang secara turun temurun diberikan masyarakat tidak merasa ditindas oleh budaya. Budaya *pahamang* dalam kebudayaan merupakan hal yang wajar saja bagi masyarakat yang ada di Sumba, dikarenakan kebiasaan ini sudah merupakan tradisi dan telah turun temurun dijalankan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat Sumba khususnya tidak akan mempertanyakan keterlibatan mereka pada *pahamang* di tikar adat atau pada rana publik.

5.2.2 Pemilikan tanah ulayat oleh *Maramba* sebagai sarana menanamkan kepatuhan pada suatu pilihan bersama

Rato (Imam Marapu), Bapak Dati Diawa Kutipan dalam wawancara mengatakan bahwa :

“*Maramba* yang punya hak atas tanah Ulayat, sebagai tuan tanah(*mangu tanangu*) ketika masyarakat mau mengolah tanah *maramba*, tidak semena-mana masyarakat kerja tapi harus ijin terlebih dahulu terhadap *maramba* atau kepada kerabat *maramba (Kabihu)* Karena merekalah yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan”³¹

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh *Maramba Umbu Ngaba Kamangi* dengan mengatakan sebagai berikut :

“Ya memang benar, kedudukan kami dan *Kabihu* sebagai kepala kampung yang bertugas sebagai pemimpin dan yang mengkoordinir segala kegiatan didalam *Paraingu* sampai pada pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat yang digunakan secara bersama. Karena kami *Maramba* bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat”³²

Keberadaan mereka masih dapat ditemui dengan adanya upacara adat yang masih berlangsung, sanksi adat yang masih ditegakkan, dan tanah ulayat mereka yang masih ada. Status tanah ulayat mereka sendiri dibuktikan dengan adanya *Katoda Padira Tana* (Tugu Batas Tanah) atau yang berisi tentang sejarah, batas-batas wilayah dan kepengurusan adat mereka, secara hukum mereka tidak memiliki bukti tertulis berupa sertifikat tetapi *Katoda Padira Tanayang* ada dapat digunakan untuk menjelaskan status kepemilikan tanah ulayat mereka. Untuk memperkuat hasil wawancara dan hasil observasi maka disajikan data hasil dokumentasi *Katoda Padira Tanapada* gambar berikut ini :

³¹Wawancara Imam Marapu, 14 April 2019

³²Wawancara Maramba, 14 April 2019

Gambar 7
Katoda Padira Tana, sebagai status kepemilikan tanah ulayat³³



Katoda Padira Tana ada sejak tahun 1950-an masih zaman *Sapraja* atau kepala kampung sebagai utusan dari *Maramba* dan *Kabihu*. Saat ini tanah ulayat mereka fungsikan sebagai lahan pertanian, dan pertanian yang dikelola oleh *Kabihu*. Tanah mereka digunakan secara bersama atau komunal yang di pimpin oleh *Maramba*.

Penjelasan ini lebih dipertegas lagi oleh Bapak Ngala Hamba Dima selaku masyarakat mengatakan bahwa :

³³Hasil Gambar Watu Padira

“*Katoda Padira Tanah* yang didirikan dibatas-batas ladang atau padang selain digunakan sebagai *Katoda Padira Tanah*, dalam kepercayaan *Marapu* di percaya sebagai permohonan untuk mengusir roh jahat yang dapat merusak ladang”³⁴

Bertolak dari hasil wawancara dan hasil observasi dapat dikatakan bahwa, Tanah bagi kehidupan masyarakat, mengandung makna yang Multidimensional. *Pertama*, secara ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya, dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.

Peran tanah dalam kehidupan manusia merupakan induk dari segala pokok kebutuhan selain dari kebutuhan pangan maupun sandang. Tanah dapat dinilai sebagai harta permanen, sebagai harta yang bernilai ekonomis berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Bukan hanya sekedar bernilai ekonomis tinggi tetapi juga memiliki nilai-nilai lainnya yang dapat menopang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebutuhan penting akan tanah bukan menjadi dasar seseorang dapat dengan mudah memiliki dan menguasai tanah.

Eksistensi masyarakat adat dan hukum adat diakui hanya jika tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan kepentingan nasional. Namun, Pembangunan hukum tanah nasional secara yuridis formal menjadikan hukum adat sebagai sumber utama, sehingga segala bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan

³⁴Wawancara Rato (Imam *Marapu*), 15 April 2019

hukum tanah nasional sumbernya tetap mengacu pada hukum adat. Konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional adalah hukum adat, seperti yang bersifat komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Dengan beragam suku bangsa adat istiadat di Indonesia maka sangat banyak hukum adat yang berlaku di setiap daerah mengenai kepemilikan tanah Ulayat.

Hak Ulayat Masyarakat Adat kadang dikesampingkan dengan kepentingan lain tanpa melihat nilai spiritual yang dimiliki sebidang tanah yang ada pada wilayah masyarakat adat. Sehingga eksistensi terhadap perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat tidak terlihat lagi.

Dalam hal ini representasi *Maramba* menjadi kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan. Bidang ekonomi, *maramba* lebih banyak berhubungan dengan pemilikan tanah, ternak, tenaga kerja, dan sebagainya termasuk menjadi sumber pemberi legitimasi terhadap pemanfaatan sumber-sumber produksi di masyarakat ketika hendak dimanfaatkan. Demikian pula, di bidang budaya, *maramba* dikenal umumnya sebagai pemegang, pemelihara dan pemberi sanksi terhadap masyarakat yang melanggar nilai-nilai adat yang dipatuhi. Di bidang keamanan dan ketertiban representasi *maramba* sangat menonjol yakni selalu memiliki kecenderungan untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat didalam wilayah adatnya. Representasi *maramba* sebagai kepala *paraingu* atau kepala kampung yang bertugas sebagai pemimpin dan yang mengkoordinir segala kegiatan

di dalam *paraingu* tersebut. Di dalam *paraingu* inilah orang sumba pada umumnya menetapkan dan melakukan kegiatan sosial, ekonomi, politik, keagamaan dan kebudayaan.